No. 266 Tahun XLVI
Eceran
Rp 2.900,-
Langganan
Rp 65.000,-/bulan
32 Halaman

HARIAN UMUM
Pikiran Rakyat
Pikiran Rakyat
MAJU BERSAMA JAWA BARAT
DARI RAKYAT - OLEH RAKYAT - UNTUK RAKYAT
bacaan warga jawa barat
BANDUNG, SENIN (PON) 26 DESEMBER 2011.
1 SAFAR 1433 H - SAFAR 1945 - HALAMAN 1

Mencegah Rekening Gendut PNS

Oleh TAN KWANG EN

BELAKANGAN ini marak terdengar berita mengenai sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki rekening gendut. Saat ini pun sedang dilakukan tindakan penanganan terhadap kasus tersebut. Menurut saya, selain tindakan penanganan yang sedang gencar dilakukan, kita juga harus memikirkan tindakan pencegahan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Saya memiliki pemikiran untuk mencegah munculnya rekening gendut PNS yang saya sebut dengan metode DIET.

Metode ini dimulai dengan *documentation* atau dokumentasi. Setiap transaksi yang menyangkut keuangan negara harus didokumentasi dengan baik. Dokumen yang baik adalah dokumen dengan nomor urut tercetak. Nomor urut tercetak penting untuk mengecek ada tidak dokumen yang hilang serta untuk pertanggungjawaban karyawan yang diberi kepercayaan untuk mengisi dan menyimpan dokumen. Bahkan, dokumen dengan nomor urut tercetak dapat dipakai untuk mendeteksi kecurangan karyawan.

Syarat kedua adalah adanya kolom yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan. Inilah satu poin yang penting mesti dipikirkan oleh perancang sistem. Termasuk juga di dalamnya kolom untuk melakukan otorisasi atau persetujuan atas transaksi. Semua transaksi yang tidak terotorisasi tidak boleh dilaksanakan.

Yang terakhir, adalah jumlah rangkapan. Dalam merancang jumlah rangkap, perancang sistem harus memikirkan berapa jumlah rangkapan yang tepat (kalau bisa seminimal mungkin). Dokumen empat rangkap dengan kertas karbon sudah terlalu tebal bagi karyawan yang bertugas untuk mengisi dokumen tersebut. Apalagi jika karyawan yang bersangkutan tidak terbiasa menulis dengan menekan bolpoin, bisa jadi, pada rangkap ketiga saja, tulisan dalam dokumen sudah tidak terbaca. Oleh karena itu, jika bisa hanya dua rangkap, kenapa harus tiga rangkap?

Hal berikutnya adalah *inspection* atau inspeksi. Harus dilakukan inspeksi berupa *cash opname* secara mendadak dan rutin untuk mengetahui apakah ada aliran kas tidak sah yang dilakukan oleh PNS. *Cash opname* dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data/informasi mengenai kas yang sebenarnya ada di kas, untuk mengecek kecermatan antara dana dari catatan menurut pembukuan dan saldo kas yang sebenarnya, dan untuk mengecek pelaksanaan kegiatan/aktivitas mengenai kas sehingga apabila terjadi penyimpangan dari sistem yang diterapkan dapat diambil tindakan koreksi. Prosedur pelaksanaan *cash opname* bisa dilakukan di antaranya dengan tutup buku kas, lalu bandingkan saldo *cash opname* dengan saldo buku. Setelah itu dibuat berita acara pemeriksaan kas, cek angka neraca dengan saldo yang ada di buku besar sampai dengan tahap akhir yaitu membuat kesimpulan dan pendapat hasil *cash opname*.

Hal berikutnya adalah *enlightenment* atau pencerahan. Terkadang sistem yang paling baik pun tidak akan bisa dijalankan apabila *user* yang seharusnya melaksanakan sistem tersebut tidak mau atau tidak bisa melakukannya. Dalam kasus kecurangan kas yang sengaja dilakukan, *user* memilih tidak mau melakukannya. Dalam hal inilah pencerahan oleh pimpinan perlu dilakukan. Bisa dalam bentuk pelatihan atau instruksi langsung dari atasan. Buatlah suatu kondisi agar mereka harus melakukan hal tersebut.

Yang terakhir adalah *take action* mengambil tindakan. Setiap bentuk kecurangan terhadap kas yang ditemui dari inspeksi harus segera ditindaklanjuti. Hal tersebut ditujukan untuk memberi efek jera pada orang lain yang mungkin akan melakukan hal tersebut. Buatlah sistem *reward* dan *punishment* (hadiah dan hukuman) yang jelas, konsisten, dan terarah sehingga PNS yang berkinerja baik mendapat bonus dan PNS lainnya yang tidak melakukan tugasnya dengan baik mendapatkan hukuman. Yang terpenting dari tindak langsung ini adalah untuk mencegah munculnya kesempatan yang akan digunakan oleh pegawai lain untuk meniru terjadinya kecurangan serupa.

Selain itu, juga dibutuhkan sedikit sentuhan pengendalian internal terhadap kas. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang). Setiap prosedur yang terkait dengan pengelolaan kas di atas wajib memiliki kebijakan pengelolaan yang tegas dan jelas. Selain itu, kebijakan itu juga harus mengandung unsur-unsur sistem pengendalian internal yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, biaya (harta) organisasi, praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, serta karyawan berkualitas sesuai tanggung jawabnya.

Hal lain yang perlu dipikirkan adalah faktor moral yang juga sangat berperan penting. Kecurangan terjadi karena adanya kesempatan. Kesempatan itu akan dimanfaatkan dengan tidak baik oleh orang yang memiliki moral tidak baik. Dengan prosedur pemilihan PNS yang baik, diharapkan para peranti pemerintahan juga dapat memiliki moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan metode DIET (Documentation Inspection Enlightenment Take action) ini diharapkan kecurangan-kecurangan terhadap kas negara yang akan terjadi dapat dicegah dan diminimalisasi. ***

***Penulis**, dosen Program Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.*